

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah komunikasi antar negara, termasuk peran beberapa negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah dan perusahaan internasional. Hubungan internasional adalah interaksi lintas batas yang dilakukan pihak tertentu berdasarkan kepentingannya, dan berbagai kebijakan diikuti dalam pengelolaan hubungan tersebut. Pada awalnya diskusi dan peserta sangat politis dan tertutup dalam membangun hubungan dengan negara lain.

Hubungan internasional adalah studi tentang pola aksi dan reaksi di negara berdaulat yang diwakili oleh elit penguasa (Coulombis dan Wolfe, 2004). Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa: “Studi hubungan internasional adalah studi tentang interaksi aktor melintasi batas negara. Munculnya hubungan internasional diperlukan karena saling ketergantungan dan kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga saling ketergantungan tidak memungkinkan suatu negara untuk menutup dirinya lepas dari dunia luar” (Perwita dan Yani, 2005).

McClellan dalam bukunya *The Dictionary of World Politics* mendefinisikan hubungan internasional antara jenis entitas sosial tertentu sebagai interaksi untuk penelitian yang meneliti keadaan penting dari interaksi tersebut. Apakah itu dilakukan oleh negara atau tidak, dan Hubungan internasional termasuk studi

tentang politik luar negeri dan politik internasional serta mencakup semua aspek hubungan antar berbagai negara di dunia (Perwita dan Yani, 2005).

Mas'ood kemudian menyatakan dalam buku “Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi” bahwa: “Tujuan utama studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara atau non-negara di arena internasional. Perilaku tersebut dapat berupa konflik, kerjasama, dll.” (Mas'ood, 2002). Hubungan internasional timbul dari koneksi dan interaksi antara negara-negara di dunia, terutama masalah politik. Seiring waktu, masalah internasional telah berubah. Negara dan aktor non-pemerintah mulai menunjukkan minat terhadap isu-isu ekonomi, lingkungan, versus sosial dan budaya (Hadiwinata, 2007).

Terdapat tiga bentuk interaksi yang terkandung dalam pokok bahasan kajian internasional, yaitu hubungan antar negara, bukan hubungan antar negara atau hubungan lintas batas negara dan beroperasinya sistem secara keseluruhan dimana negara dan masyarakat menjadi komponen utamanya (Wijatmadja 2016). Hal inilah yang membuat studi hubungan internasional mempelajari berbagai bidang seperti politik (internasional), ekonomi (internasional), organisasi internasional (OI), organisasi antar pemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (LSM), dan korporasi multinasional (MNC), hukum internasional, teori hubungan internasional dan sebagainya. Pengakuan studi hubungan internasional pertama kali muncul karena adanya kesadaran akan pentingnya pencegahan perang dan untuk pelaksanaan ketertiban dunia.

Mengutip dari buku Wijatmadja berjudul “Pengantar Hubungan Internasional”, ruang lingkup kajian hubungan internasional secara tradisional adalah negara sebagai aktor dalam hubungan internasional, kepentingannya diselaraskan, terutama dalam masalah keamanan dan kekuatan nasional. Maka dari itu pada saat itu topik utama dalam Hubungan Internasional tidak jauh dari krisis antar negara, perlombaan senjata, perang, penyebab perang dan sebagainya. Subjek hubungan internasional kemudian bergeser ke arah diplomasi, hukum internasional, tatanan dunia, *gender*, lingkungan hidup dan sebagainya. Aktor dalam hubungan internasional adalah siapa saja yang berperan dalam hubungan internasional yang meliputi negara dan non negara. Negara, dalam interaksinya dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional mengejar kepentingan nasionalnya. Berikut beberapa di antaranya:

- a. Organisasi internasional, lembaga yang beranggotakan dua negara atau lebih, yang kegiatannya melintasi batas negara.
- b. Perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai negara dan berkantor pusat di negara induk.
- c. Teroris, istilah yang mengacu pada tindakan atau ancaman seseorang atau kelompok yang menggunakan kekerasan yang dirancang untuk menanamkan rasa takut.
- d. Seorang individu (Wijatmadja, 2016).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan model hubungan atau interaksi masyarakat internasional. Kerjasama dapat dilakukan dalam beberapa bidang, seperti ekonomi, politik, keamanan atau perdamaian, budaya dan hak asasi manusia, baik oleh aktor negara maupun non negara seperti pelaku non-pemerintahan. Melalui model kerjasama hubungan internasional diharapkan membawa perubahan bagi para pelakunya yaitu dalam situasi perkembangan kemajuan di segala bidang baik internal maupun eksternal.

Kerjasama juga dilakukan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh negara. Saat ini kerjasama sudah umum di negara-negara di dunia. Kerjasama tidak hanya terbatas pada hubungan negara, tetapi juga aktor non negara dapat berpartisipasi di dalamnya. Bersamaan dengan fenomena globalisasi yang memperluas peluang para pelaku hubungan internasional untuk saling berkomunikasi (Sudagung, 2015).

Kerjasama internasional dapat muncul dari kewajiban antar negara, kepercayaan antar negara, dan keinginan negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan negara-negara tersebut, daripada negara yang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara yang saling menguntungkan. Menurut Betsil (2006), “kebijakan lingkungan internasional adalah saling ketergantungan antar aktor dalam kerjasama internasional yang membuat mereka bekerja sama untuk menghadapi ancaman yang mengancam kepentingan nasional.”

Dalam kerja sama internasional, berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa bertemu, yang tidak dapat diwujudkan di negara mereka sendiri. Kerja sama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional, yang juga merupakan bagian dari hubungan internasional. Persoalan utama kerja sama internasional didasarkan pada sejauh mana manfaat bersama dari kerja sama dapat mendukung persepsi yang unggul. Kerja sama internasional muncul karena kehidupan internasional mencakup berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005).

Kerjasama diperlukan untuk terwujudnya tujuan atau kepentingan bersama, dan dalam kerjasama internasional terdapat perbedaan kepentingan nasional antar negara, namun hal itu tidak menjadi masalah asalkan kerjasama tersebut memiliki tujuan yang saling sejalan sebagai kepentingan. Kerjasama internasional dapat terjadi berkat adanya kesamaan visi dan menyelaraskan kepentingan aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, pihak tersebut mengambil kepentingannya sendiri lebih mudah diterapkan daripada mencobanya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor internasional, persyaratan ini disebabkan oleh saling ketergantungan antara aktor internasional dan kehidupan manusia yang kompleks dengan distribusi sumber daya yang tidak merata. Sifat kerja sama internasional yang dibutuhkan oleh aktor internasional biasanya berbeda, misalnya harmonisasi dengan integrasi.

Kerja sama seperti itu terjadi jika ada dua orang kepentingan bertemu dan konflik tidak muncul (Smith, 1990). Kerjasama internasional sebagai keseluruhan

hubungan tidak didasarkan pada unsur pemaksaan dan kekerasan. Kerjasama bisa saja terjadi sebagai akibat dari kewajiban individu dan nasional dalam kesejahteraan kolektif (Doherty dan Pfaltzgraff, 1997).

Kerja sama juga dapat dihasilkan dari komitmen individu terhadap kebaikan bersama atau dari upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang penting dalam perilaku kerjasama adalah sejauh mana masing-masing pihak percaya bahwa pihak lain akan bekerja sama. Masalah utama dari teori kerjasama adalah realisasi kepentingan pribadi, di mana hasil yang saling menguntungkan dicapai dalam kerja sama daripada berusaha mewujudkan kepentingan seseorang dengan berusaha sendiri atau bersaing. Dalam kerja sama internasional, berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa bertemu, yang tidak dapat diwujudkan di negara mereka sendiri. Persoalan utama kerja sama internasional didasarkan pada sejauh mana manfaat bersama dari kerjasama dapat mendukung persepsi keunggulan sepihak dan kompetitif. Kerjasama internasional muncul karena kehidupan internasional mencakup berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

Dalam negara sendiri instrumen para pihak yang pada hakikatnya menjadi acuan dalam kerjasama antar negara, kerjasama dalam hubungan internasional mungkin timbul karena munculnya perbatasan dan masalah dalam menghadapi aktor negara atau aktor non negara yang memerlukan bantuan negara lain atau bantuan dari badan organisasi internasional untuk pembangunan ekonomi melalui impor dan ekspor ataupun bantuan dari aktor non negara dan dalam kaitannya dengan pembangunan negara politik, ekonomi, sosial, budaya dll. Oleh karena itu

kerjasama internasional adalah sebuah acuan dalam semua aspek nasional maupun internasional.

Baik negara maupun aktor internasional lainnya tidak dapat menghindari kerja sama internasional. Kebutuhan ini muncul dari semakin kompleksnya saling ketergantungan antara aktor internasional dan kehidupan manusia, yang meningkatkan ketidakmerataan distribusi sumber daya yang dibutuhkan oleh aktor internasional. Sifat kerjasama internasional biasanya berbeda-beda, misalnya harmonisasi (kerjasama internasional yang kuat). Ketidakcocokan atau konflik tidak dapat dihindari, tetapi dapat ditekan jika kedua belah pihak bekerja sama dalam kepentingan dan masalah mereka.

Kegiatan yang dilakukan aktor negara maupun aktor non negara tersebut melalui kerja sama internasional meliputi kerja sama multidimensi, seperti kerja sama ekonomi, kerja sama sosial, dan kerja sama di bidang politik. Kerjasama tersebut kemudian dibentuk menjadi sebuah wadah yang menampung para aktor untuk bekerjasama dalam berbagai bidang tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi biaya kerjasama adalah aktor negara mengundang orang-orang terkait seperti aktor non negara secara bebas dan leluasa untuk berpartisipasi dalam inisiatif kerjasama tanpa banyak membebani negara dengan cara "*open source*" (Fisher, 2008).

Dan juga, kerjasama juga bisa terjadi tanpa adanya perjanjian formal. Karena birokrasi yang lambat dapat mempengaruhi sebuah aktor yang membutuhkan kerjasama formal dan informal, kerjasama dapat dilakukan cukup

sering untuk mendorong kerjasama formal (Chisholm, 1992). Beberapa bahkan mungkin dihilangkan dari formalitas aktor non negara yang tidak mau bersusah payah tanpa henti dalam prosedur di dalam sistem pemerintahan. Dalam informalitas, meskipun diizinkan oleh undang-undang atau praktik, namun hal tersebut dapat melingkupi formalitas kerjasama. Selain itu, kerjasama informal atau hubungan informal yang membantu mengeksploitasi keunggulan aktor non-negara seperti fleksibilitas dan efisiensi yang informal juga dapat mencakup ranah publik dan privat dalam kerjasama (Evans, 1997).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu bagian terpenting hubungan internasional yang melibatkan negara-negara peserta interaksi. Karena itu, ketika berhadapan dengan hubungan internasional, negara harus mempunyai kepentingan nasional sendiri, kepentingan nasional adalah tujuan atau keinginan yang dicapai negara dalam interaksi Hubungan Internasional Dalam Kepentingan Nasional dan Politik dunia Kontemporer. Kepentingan nasional adalah kepentingan yang fleksibel (Rochester, 1978)

Kepentingan nasional adalah kebutuhan negara. Salah satu obyek minat nasional digunakan untuk menggambarkan kebijakan luar negeri suatu negara. Termasuk dalam hal kerjasama internasional. Kolaborasi ini karena itu yang merupakan kepentingan nasional masing-masing negara apa tujuan negara. (Sitepu, 2011: 163)

Hal tersebut, sering melibatkan hubungan internasional dengan kepentingan nasional atau dengan *national interest* jika pola interaksinya demikian terbentuk tidak bisa lepas dari kepentingan nasional masing-masing peserta interaksi. Penciptaan kepentingan nasional didasarkan pada keragaman milik masing-masing negara yang terbatas dan juga bervariasi dari satu negara ke negara lain dengan orang lain. Itu dipengaruhi oleh alam, budaya, sejarah dan sumber kekuasaan dan lain-lain. Kepentingan nasional dibagi menjadi empat bagian (empat) jenis, yaitu. ideologi, keamanan, ekonomi dan prestise. Kepentingan nasional merupakan tujuan dan faktor penentu terbentuknya politik luar negeri suatu negara (Kusuma dan Putri, 2021).

Sebagai pengungkap pertama menurut Hans J Morgenthau Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah sarana untuk mencapai dan untuk mencapai kekuasaan, karena dengan kekuasaan negara dapat memerintah negara lain menurut Morgenthau, konsep kepentingan nasional adalah kapasitas negara menjaga dan melindungi fisik, politik, dan identitasnya terhadap budaya negaranya, yang tentunya karena ketiadaan negara lain. Kerjasama internasional yang baik antar negara adalah salah satu bentuknya kepentingan nasional atau kepentingan nasional. Tentang bagaimana mencapainya diimplementasikan dalam beberapa cara, termasuk pembangunan berkelanjutan, program pemerintah, kerjasama internasional, dll.

Kepentingan nasional sangat penting untuk kelangsungan hubungan internasional, karena kepentingan nasional merupakan bagian dari hubungan internasional tersebut, yang misinya tidak lain adalah untuk melindungi

keberlanjutan dan eksistensi negara di berbagai sektor dan bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, dll. Kepentingan Nasional mengutip buku berjudul Wijatmadja "Pengantar Hubungan Internasional" dapat didefinisikan secara berbeda kriteria Yang pertama adalah kriteria ekonomi, kebijakan yang memperkuat posisi ekonomi negara milik kepentingan nasional. Yang kedua adalah kriteria ideologi, kriteria ideologi mempengaruhi penggunaan negara dengan cara tertentu memandang dunia dan mendefinisikan kepentingan nasionalnya. Ketiga adalah kriteria keamanan militer, negara melihat keamanan militer sebagai faktor penentu kepentingan nasionalnya, karena keamanan (kekuasaan) militer memiliki perannya masing-masing penting dalam hubungan internasional. Yang keempat adalah kriteria moralitas dan legalitas, yang definisinya sering diperdebatkan kepentingan nasional. Kelima, adanya kriteria lain yang mengandung masalah budaya, kebangsaan, ras dll (Wijatmadja, 2016).

2.1.4 *Non State Actor* dalam Hubungan Internasional

Di kancah internasional, ada banyak aktor yang terlibat dalam apa yang disebut politik internasional. Salah satu aktor tertua dan diakui secara umum di panggung dunia modern adalah negara. Di masa lalu, hubungan internasional diasumsikan terdiri dari hubungan antar negara. Dengan kata lain, negara dianggap sebagai pemain terpenting dalam politik dunia. Namun, hal ini berubah dengan cepat dengan munculnya berbagai *non state actor*. Banyak yang berpendapat bahwa dengan globalisasi dan liberalisasi, aktor-aktor *non state* telah mereduksi kekuasaan dan praktisi negara dalam sistem internasional. Fenomena ini biasanya dinyatakan

dalam sistem internasional sebagai "penurunan peran negara" atau "penarikan negara". Sederhananya, aktor negara mewakili pemerintah, sedangkan *non state actor* tidak. Namun, mereka berdampak pada aktor negara. Contoh *non state actor* adalah MNC, TNC, IGO, LSM, masyarakat sipil, organisasi teroris, aktor agama, diaspora dan aktor etnis, dll (Baral, 2016). Ini adalah perusahaan besar yang memiliki dan mengendalikan pabrik dan kantor di setidaknya satu negara dan menjualnya produk dan layanan di seluruh dunia. Ini adalah perusahaan besar yang anak perusahaan dan afiliasinya beroperasi di seluruh dunia di beberapa negara secara bersamaan. Perusahaan multinasional adalah "faktor kunci dalam integrasi ekonomi global" dan "menciptakan hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara ekonomi di seluruh dunia." Mereka dengan sangat efektif mengelola kebijakan luar negeri negara-negara, bahkan yang paling kuat sekalipun, dan mengatur agenda politik internasional. Mereka telah menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi nasional. Mereka menyebabkan perpecahan politik dan sosial dan menghambat perkembangan industri dalam negeri di negara tuan rumah.

Dalam hal tersebut lebih banyak *non state actor* menunjukkan kemampuan internasional bahkan melawan kekuatan besar. Menyerang ekonomi teroris internasional dan negara adidaya militer AS mengejutkan semua pihak, *non state actor* seperti Al-Qaeda langsung mampu menyebabkan Amerika Serikat menyerang Afghanistan dan memperkuat hegemoninya timur tengah. Hal lainnya, pengeboman berlangsung di beberapa tempat berkumpulnya orang asing di Indonesia, dibimbing oleh alumni dari Afganistan.

Pada tingkat pendidikan kewarganegaraan sekolah menengah berisi materi tentang Hubungan Internasional. Di dalam pembahasannya masih ada subjek hubungan antar negara yang mendominasi. Meskipun masih dianggap sangat penting, untuk mempelajari hubungan internasional Level ini harus mulai menyadarkan siswa akan hal ini *non state actor* menjadi lebih kuat mempengaruhi tatanan hubungan internasional. Menurut Alat tren terbaru dalam hubungan internasional adalah:

Ini melibatkan empat perubahan utama dengan permasalahan di atas memiliki dampak yang sangat besar hubungan antar bangsa, yaitu: pertama kecenderungan perubahan internal konstelasi politik global, dalam bingkai bipolar ke bingkai multipolar, kedua konfirmasi gejala timbal balik saling ketergantungan antar negara dan satu sama lain keterkaitan masalah global berbagai bidang, politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan dan dll. Semakin banyak dengan itu juga memperkuat pengaruh globalisasi semua efek, baik positif dan tidak negatif, ketiga tumbuh peran *non state actor* dalam hubungan internasional, keempat pertanyaan baru ada dalam agenda internasional seperti hak asasi manusia kemanusiaan, intervensi kemanusiaan, dan juga demokrasi. Dalam artian *non state actor* pun dapat mengubah fakta yang memiliki sifat yang material dan fenomena social yang menjadi isu internasional melalui advokasi yang dikerjakan.

Peran *non state actor* juga kini semakin meningkat, membuat actor negara menjadi tidak relevan. Hal ini ni terjadi juga dalam semua kegiatan internasional lainnya. Meskipun negara tampak memiliki legitimasi dalam hubungannya dengan warga negaranya, termasuk legitimasi dalam hubungannya dengan *non state actor*

terkait dengan asal-usulnya, yang berarti kekuatan politiknya jauh lebih besar, sebenarnya legitimasi negara juga memiliki batasan dalam hal penggunaan hukum internasional. Pada saat yang sama, *non state actor* sulit dijangkau melalui hukum, apalagi membawa mereka ke pengadilan. Dengan demikian, kebetulan negara menggunakan jasa *non state actor* di ruang internasional untuk mengimplementasikan kepentingan negara, yang tidak terikat oleh hukum internasional, tetapi tidak bertindak atas nama negara, tetapi sebagai *non state actor*. Pada akhirnya, negara bergantung pada para *non state actor* ini, dan yang akan terjadi adalah semakin pentingnya peran *non state actor* dalam hubungan internasional dan manajemen kekuasaan (Soetjipto, 2018).

Itulah sebabnya dengan melihat perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat setelah serangan September 2001. Ini adalah contoh yang baik bagaimana *non state actor* mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Pasca penyerangan, para sarjana Barat mencoba menilai kembali peran agama dalam hubungan internasional satu sama lain. Serangan dramatis dan profil tinggi baru-baru ini oleh organisasi teroris jihadis di Madrid dan London telah memperkuat narasi ini. Dengan demikian, jelas bahwa kebangkitan *non state actor* dan hubungan antar negara telah menyerang sistem internasional yang berpusat pada negara. Itu mengubah sifat hubungan internasional. Aktor non-negara telah memaksa perubahan konsep kedaulatan dan nasionalisme. Hal ini mempengaruhi peran negara bangsa sebagai partisipan dalam hubungan internasional. Kebijakan, keputusan, dan tindakan negara-bangsa kini semakin dipengaruhi oleh kehadiran dan aktivitas aktor non-negara. Yang terakhir

muncul sebagai aktor non-politik, komersial, ekonomi, budaya atau komersial yang kuat di lingkungan internasional.

Peran *non state actor*, organisasi antar pemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah internasional (yaitu INGO atau LSM) dan perusahaan multinasional (MNC) dianalisis. Meskipun pihak non-pemerintah dalam hubungan internasional telah menjadi aktor penting dan aktif dalam sistem internasional, tidak berarti bahwa peran negara bangsa akan berakhir di masa depan. Peran negara bangsa akan sangat penting dalam mempromosikan kerja sama dan kolaborasi internasional. Selain itu, organisasi antar pemerintah dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak badan internasional lainnya ada sesuai dengan keinginan negara-negara tersebut. negara bangsa. Negara bangsa masih (hampir) memonopoli penggunaan kekuatan koersif dalam sistem internasional. Itu terus membentuk tindakan *non state actor* lebih dari perilaku mereka (Baral, 2016). Maka dari itu banyak negara yang mengajak *non state actor* untuk melakukan hal-hal yang dapat memberikan kesan baik untuk negara yang mengajaknya. Seperti halnya Bangtan Soenyondan sebuah *non state actor* yang bekerjasama dalam mengurangi permasalahan yang krusial.

2.1.5 Rasisme dalam Hubungan Internasional

Konsep rasisme dan pembelajaran hubungan internasional adalah sebuah keseragaman dan tidak dapat dipisahkan. Tiga paradigma utama ilmu hubungan Internasional yaitu realisme, liberalisme dan marxisme dibangun di atas fondasi

intelektual rasis, fokus dan mengakar dari supremasi kulit putih, wacana eropa dan dunia barat (Henderson, 2015; Zvobgo dan Loken, 2020). Konsep rasisme adalah konsep yang ada karena perbedaan etnis dan ras manusia di muka bumi. Ras adalah sesuatu yang mengklasifikasikan dan mengkategorikan manusia berdasarkan kualitas fisik, kualitas sosial, asal usul asal geografis, keturunan dan budaya (Barnshaw, 2008). Di sisi lain, hal tersebut berjalan senagai sebagai konstruksi sosial yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mencirikan populasi yang terlihat berbeda (Blakemore, 2019). Berbagai kompetisi dan pilihan ini menghasilkan masalah rasisme, yang kemudian menjadi salah satu konsep ilmu hubungan internasional. Perbedaan rasial ini sangat mendasar untuk ras yang tampaknya lebih baik daripada menindas tetapi kelompok lain lebih buruk ilmiah tidak ada ras yang lebih unggul atau bahkan lebih buruk. Secara khusus, rasisme merupakan bentuk sikap sombong (prasangka, aroganisme dan diskriminatif) yang ditujukan kepada sekelompok orang (ras, suku, agama, suku, marga) ke sekelompok lain, atas dasar keyakinan atas suatu kelompok tersebut yang merasakan memiliki keunggulan di atas kelompok lain (Ghani, 2008).

Praktik rasisme dapat digambarkan segregasi, kekerasan, *apartheid*, prasangka dan supremasi kulit putih. Untuk mengetahui lebih awal kita bisa menunjukkan awal dari rasisme dengan sejarah dan budaya kolonial *Eurosentrisme* yang dipraktikkan orang kulit putih Eropa untuk waktu yang sangat lama (Ghanbarinajjar, 2013). Melalui praktik budaya *Eurosentrisme* dan kolonialisme, manusia kulit putih Eropa yang lebih dahulu mendominasi ras lain negara ini. Budaya *Eurosentrisme* ini masih ada dan juga masih menjelaskan apa artinya orang

kulit putih di mana-mana dunia terasa lebih baik dan selalu terkendali non-kulit putih. Oleh karena itu rasisme juga sering digambarkan dengan nama prasangka dan perilaku diskriminatif orang kulit putih melakukannya ras lain. Bowser menjelaskan dalam tulisannya dari tingkat rasisme itu tingkat rasisme ini telah direformasi dan dijelaskan kembali ditulis oleh Bowser dari tulisan James Jones berjudul *Prejudice and Racism*. Jones pengelompokan tingkat rasisme tiga kelompok yaitu tingkat budaya, tingkat kelembagaan dan tingkat individu. Tingkat rasisme yang dilakukan Jones dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat budaya, Rasisme pada tataran atau tingkatan budaya ini masih dalam masa pertumbuhan awal rasisme dimana sadar atau tidak sadar menyadari bahwa itu diturunkan dari generasi ke generasi generasi. Tahap awal ini biasanya mempengaruhi perbedaan beberapa hal yang membuat perbedaan perilaku, norma, nilai dan keyakinan antara dua kelompok ras yang berbeda. Perbedaan yang jelas ini menimbulkan rasa superioritas atas ras yang dirasakan lebih baik dan memiliki kekuatan lebih untuk menyebabkan pembentukan hirarki rasial.
2. Tingkat kelembagaan, Hierarki rasial di tingkat kelembagaan terbentuk secara budaya institusi sosial yang menguatkan penonton hierarki rasial ini bisa berlangsung di taman, sekolah, kantor, pusat biaya, pengadilan, lingkungan tempat tinggal, rumah sakit, kolam renang, dan lembaga sosial lainnya. Dalam banyak kasus hierarki rasial ini untuk mendirikan lembaga sosial memberikan fasilitas yang sangat baik berguna untuk orang dengan kulit putih di mana tindakan berlangsung di sisi lain itu merugikan non-kulit

putih (seperti orang kulit putih, orang kulit hitam, orang asia dan orang-orang Latin). Tingkat hierarki ras lembaga ini dibentuk melalui yurisprudensi, ketidaksetaraan standar, dan nilai-nilai yang berlaku di masing-masing institusi.

3. Tingkat individu, Hirarki rasial hadir secara budaya dan kelembagaan, begitulah keadaannya mempengaruhi dan membentuk sikap satu melawan yang lain. Pada tingkat ini tampaknya menjadi kepercayaan yang khas pada dalam diri seseorang, maupun itu suatu prasangka ataupun diskriminasi kepada ras yang lain.

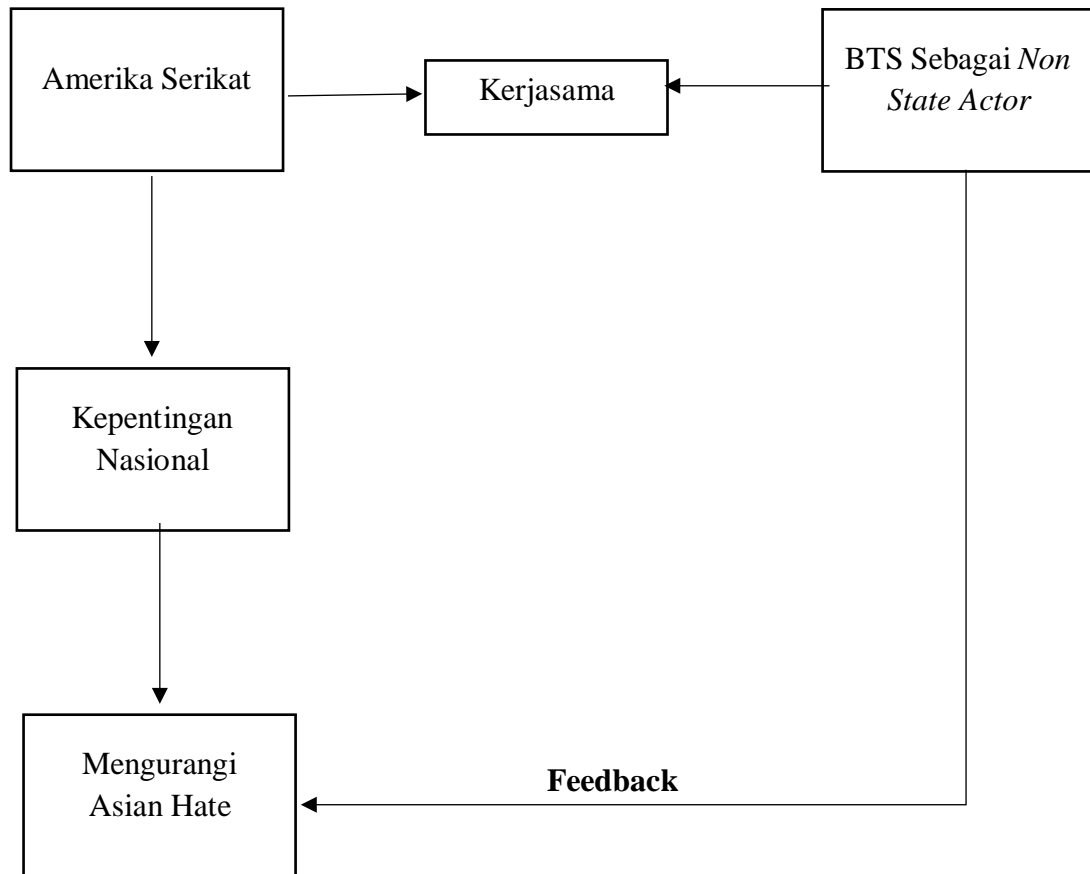
Rasisme digunakan untuk menjadikan pembenaran suatu penindasan ras selain kulit. Penekanan putih adalah istilah yang menggambarkan hubungan yang ada terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih dari individu atau eksploitasi, eksploitasi dan kehilangan haknya. Kelompok lemah seperti itu biasanya dipaksa untuk puas dengan apa yang mereka miliki dipaksakan oleh penindas. Kebanyakan dari orang-orang ini memilih diam dan patuh tanpa perlawanan karena perlawanan ini bisa mengubah segalanya dan hanya membebani diri sendiri.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mempelajari manusia hingga berbagai macam konteks ilmu sosial. Ilmu hubungan internasional adalah studi mengenai pola dan reaksi antara negara-negara yang berdaulat yang diwakili para

elit pemerintah. Dan melibatkan negara-negara ke dalam interaksinya Bersama aktor-aktor di dalam hubungan internasional dengan tujuan mengejar kepentingan nasionalnya. Dengan memiliki tujuan untuk mempelajari perilaku internasional, seperti perilaku aktor negara ataupun aktor non-negara dalam lingkup internasional. Dan perilaku tersebut dapat berbentuk konflik, kerjasama, dan lain sebagainya. Seperti Amerika Serikat yang melihat peluang kerjasama demi menangani permasalahan di negaranya.

Dalam kasus penelitian ini, Amerika Serikat melalui BTS menjadi salah satu cara Amerika dalam menangani permasalahan yang mengakar yaitu rasisme dan salah satunya adalah rasisme terhadap orang Asia-Amerika, yang dimana Amerika sendiri memiliki segudang permasalahan rasisme. Karena rasisme masih menjadi suatu isu yang hangat diperbincangkan bahkan dirasakan oleh sebagian Kalangan khususnya di Amerika Serikat. Dalam hal ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang telah menyatakan dengan mengutuknya rasisme terhadap Asia-Amerika di Amerika Serikat yang menimbulkan Asian Hate. Hal tersebut tentunya ingin segera dihilangkan dari negaranya. Salah satunya dengan memunculkan Gerakan Stop Asian Hate, dan cara lainnya adalah Kerjasama bersama Bangtan Sonyeondan (BTS), karena BTS telah merepresentasikan orang Asia dan BTS pun telah ikut menarik simpati publik dalam itikad baiknya dengan menentang atas kejahatan rasisme terhadap Asia-Amerika. Oleh karena itu, melalui BTS sebagai selebriti sekaligus *non state actor* ini memiliki peranan yang penting dalam pengurangan permasalahan rasisme Asia-Amerika bagi AS, hal tersebut sangat penting dalam mewujudkan upaya yang dilakukan Amerika Serikat saat ini.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran